# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dengan melakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan wujud dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2002. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak, yang mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Agus martowardojo,www.pajak.go.id, mei 2010).

Sebagai akibat dari perubahan organisasi menuju modernisasi, sistem informasi yang diperlukan DJP tentunya juga harus mampu menangkap permintaan-permintaan *user* atas informasi yang diperlukan, agar menghasilkan informasi yang berkualitas. Kriteria-kriteria kualitas informasi yang diperlukan menurut (Wilkinson, 1993:14-15) yaitu informasi harus dapat dipercaya (*reliable*), akurat (*accuracy*) dan tepat waktu (*timely*). Oleh karena itu, apabila adanya

keusangan dari sistem informasi (khususnya informasi akuntansi), maka harus segera diadakan modifikasi atau pengembangan terhadap sistem informasi tersebut secara umum, dicapai melalui beberapa tahap dimulai dengan perencanaan sistem, analisis sistem, implementasi sistem dan diakhiri dengan pengoperasian sistem.

Program modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi dalam sistem informasi di DJP masih menunjukkan hasil informasi yang kurang optimal. Hal ini ditunjukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menemukan 12 ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008. Dalam hasil pemeriksaan tersebut BPK mencatat masih ada sebagian departemen penting masih memiliki opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam hasil audit laporan keuanganya. BPK berkeinginan untuk menjelaskan sejauh mana transparansi dan akuntabiltas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. BPK juga menyampaikan 12 penemuan penting, diantaranya yaitu Hibah yang diterima langsung oleh 15 Kementerian/Lembaga (K/L) minimal sebesar Rp 3.93 triliun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam mekanisme APBN. Selain itu, temuan penting lainnya adalah Aset eks KKKS sebesar Rp 303,39 triliun dan aset eks BPPN sebesar Rp12,42 triliun belum dapat diyakini kewajarannya, serta PBB Migas dan Panas Bumi sebesar Rp 5,33 triliun atas KKKS yang belum berproduksi salah dibebankan pada rekening 600 dan 508 (Hanif Wibisono,detikFinance,17/6/2009).

Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan menelusuri beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang menangani wajib pajak besar. Karena dalam

hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009, ditemukan potensi kerugian negara di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (Jalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta) hingga Rp 96 triliun. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009 dikatakan, KPP Wajib Pajak Besar Satu belum melakukan tindak lanjut secara optimal atas potensi penerimaan pajak maksimal sebesar Rp 96,91 triliun dari selisih peredaran usaha PPN dan PPh pada 2007 dan 2008. Ini mengakibatkan peredaran usaha yang dilaporkan tidak dapat diyakini kebenarannya. Potensi penerimaan pajak yang bisa digali dari selisih peredaran usaha belum dapat direalisasikan. BPK menilai potensi kerugian negara tersebut sebagai akibat dari kelemahan sistem pengendalian internal pada kegiatan operasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu pada tahun anggaran 2008 dan 2009. Namun BPK juga menyatakan hal ini masih harus diteliti, diuji, dan didalami di mana dari hasil penelitian tersebut dapat saja disimpulkan tidak terdapat potensi PPh dan PPN (Herdaru Purnomo, detikFinance, 19/04/2010).

Diterapkannya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan informasi akuntansi yaitu Program Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN), informasi penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dihasilkan belum menunjukkan kualitas yang baik dalam hal *timelines* atau ketepatan waktu. Hal ini ditunjukkan dengan Program Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di KPP yang kemudian tersentralisasi di kantor pusat memiliki kendala kelambatan perolehan informasi yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh

sistem informasi yang lambat dalam *running* bahkan "*hang*" apabila beban kerjanya terlalu berat (kurnia:25 Maret 2011). Dengan begitu informasi tidak memenuhi salah satu ciri informasi yang berkualitas yaitu tepat waktu.

MPN dan SIKKA di KPP dirasa lambat saat ini karena *server* yang ada masih terbatas, jadi aksesnya menjadi lambat. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Kasubag Umum di KPP Karees, SIDJP biasanya hanya digunakan di pulau Jawa sedangkan di luar Jawa masih memakai SIPMod. Karena SIDJP mengandalkan jaringan maka *server* itu sangat penting bagi SIDJP yang merupakan sistem yang terintegrasi ke seluruh Indonesia. Akibatnya KPP bisa terganggu masalah migrasi data dan kesulitan mendapat data / informasi yang sifatnya penting dan mendesak. Selain itu proses transfer data/informasi melalui SIDJP sangat "lemot" ini mungkin dikarenakan adanya tubrukan data saat pengiriman data secara bersamaan antar KPP. (Ahmad, 18 april 2011) Selain itu informasi yang dihasilkan DJP belum mencapai kualitas yang diharapkan. Mel-kias, mengatakan bahwa data realisasi penerimaan pajak belum terintegrasi, hal ini membuat sering terjadi perbedaan pencatatan antara Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan Negara. Penerimaan perpajakan dicatat oleh Ditjen Pajak dalam SAI dengan menggunakan modul penerimaan negara (MPN) dan Ditjen Perbendaharaan Negara mencatatkannya dalam kas negara dengan sistem SAU. Perbedaan pencatatan Sebelumnya, dalam LHP atas LKPP 2008. BPK juga sudah menemukan adanya perbedaan realisasi penerimaan perpajakan menurut SAI dan kelemahan pencatatan penerimaan perpajakan dalam aplikasi modul penerimaan

negara (MPN). Penyebab lainnya adalah penerimaan PPh Pasal 23 juga turun 6,5%, karena turunnya volume transaksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan PPh Pasal 25 dan 29 orang pribadi yang juga turun 23,3% karena pada 2009 masih terdapat tambahan penerimaan dari program sunset policy Januari-Februari 2009 (lachmad.aris@bisnis.co.td, Jun 2010).

Informasi yang tersedia dan digunakan manajemen sangat membantu dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga diharapkan kinerja akan meningkat. Seperti yang dinyatakan oleh Atkinson et al (1995: 5) bahwa informasi yang dihasilkan dari sistem informasi dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dari unit organisasi atau perusahaan. (Agus:September 2009). Demikian pula dengan DJP memerlukan informasi yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja.

Informasi yang berkualitas diharapkan sebagai output suatu sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi senantiasa mengalami perubahan besar, dimungkinkan karena sistem informasi beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam instansi itu sendiri atau dengan lingkungannya. Kemudian pada hakikatnya, akuntansi merupakan penerapan teori umum informasi terhadap masalah operasi yang ekonomik dan efisien. Akuntasi juga membentuk sebagian besar informasi umum yang dinyatakan secara kuantitatif. Dalam konsep sistem informasi akuntansi ini, akuntansi menjadi bagian dari sistem informasi umum dari suatu kesatuan yang beroperasi sekaligus menjadi bagian dari suatu bidang yang dibatasi oleh informasi. Kemampuan instansi dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi akan menentukan apakah suatu instansi bersih atau

tidak. Salah satu syaratnya adalah tersedianya sistem akuntansi yang akurat di instansi tersebut. Dengan tersedianya sistem akuntansi yang akurat, mudah dioperasikan, mempersingkat waktu serta efektif pada saat ini merupakan salah satu solusi agar organisasi atau instansi dapat dipercaya oleh masyarakat dan diharapkan instansi tersebut dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, sehingga dapat terus berkembang pada masa yang akan datang. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dari sudut pandang sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur yang membentuk sistem tersebut dan mengidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang membentuk sistem tersebut. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. (issuu.com, November, 2010).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem informasi yang dikembangkan yaitu sistem informasi yang memiliki *core* kepada pelayanan pada wajib pajak dan sistem informasi yang bukan termasuk *core* pelayanan yaitu sistem informasi akuntansi, yaitu Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang sekarang digantikan Oleh Modul Penerimaan Negara (MPN), dan SIKKA. MP3 berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara on-line. Aplikasi MP3 ini adalah bagian dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Namun sekarang, penggunaan MP3 sudah digantikan dengan Program yang lebih maju dari MP3 yaitu Program Modul Penerimaan Negara (MPN). Sistem ini adalah suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. MPN merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sistem ini mengintegrasikan tiga sistem penerimaan yang selama ini berjalan, yaitu Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, Sistem *Elektronik Data Intercharge* (EDI) oleh Ditjen Bea dan Cukai, dan Sistem Penerimaan Negara (Sispen) oleh Ditjen Anggaran. Sedangkan Sistem informasi akuntansi Direktorat jenderal pajak yang lain adalah Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA). Sistem ini terpisah dari SIDJP yang selama ini kita kenal. Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan data dan aktivitas pegawai pajak dan juga aktivitas keuangan Kantor pelayanan pajak. KPP adalah bagian dari instansi pemerintah yaitu dibawah lembaga Departemen Keuangan. Departemen Keuangan adalah salah satu instansi pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan anggaran untuk belanja rutin. Pertanggungjawaban tersebut membutuhkan informasi akuntansi yang diperoleh dari SIKKA. (SE - 24/PJ/2010)

Salah faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Akuntansi guna menghasilkan informasi yang berkualitas adalah penggunanya *(user)*. Informasi dalam suatu perusahaan adalah sebagai alat bantu mencapai tujuan melalui penyediaan informasi. Tetapi peranan yang penting dalam organisasi tetaplah manusia sebagai penentu keputusan. Jadi, peranan manusia dalam sistem informasi sangat vital, karena perencanaan dan perancangan

sistem harus lebih jauh memperhatikan faktor manusia (Burch dan Grudnitski, 1991). Selanjutnya Bodnar dan Hopwood, juga menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan antara *system analyst*, pemakai *(user)*, *sponsor* dan *customer*. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari penolakan terhadap sistem yang dikembangkan *(resistance to change)*. Untuk menghindari penolakan terhadap sistem yang dikembangkan, maka diperlukan partisipasi dari pemakai *(user)*. Partisipasi pemakai pada tiap tahap pengembangan sistem informasi tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas sistem yang dikembangkan. Partisipasi pemakai pada tiap tahap pengembangan sistem informasi, tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas sistem yang dikembangkan (Sunarti Setianingsih, 1998:193).

Diperlukannya partisipasi dalam pengembangan sistem informasi telah diakui secara luas dalam literatur. Partisipasi merupakan perilaku, pekerjaaan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemakai selama proses pengembangan sistem informasi. Oleh karena itu, partisipasi pemakai untuk mencapai keberhasilan sistem diharapkan akan meningkatkan komitmen dan ketelibatan pemakai dalam pengembangan sistem, sehingga pemakai dapat menerima dan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan dan akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pemakai (Elfreda Aplonia, 2004:28).

Rosemary Cafasaro dalam O'Brien dan Marakas (2009) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menyebabkan sukses atau tidaknya suatu organisasi/perusahaan dalam menerapkan sistem informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesukesan penerapan sistem informasi, antara lain adanya dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan *end user* (pemakai akhir), penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang matang, dan harapan perusahaan yang nyata. Sementara alasan kegagalan penerapan sistem informasi antara lain karena kurangnya dukungan manajemen eksekutif dan input dari *end-user*, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang tidak lengkap dan selalu berubah-ubah, serta inkompetensi secara teknologi.

Fokus program reformasi perpajakan pada perbaikan sistem dan manajemen SDM. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan berintegritas. DJP dengan system administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. DJP tealah melakukan pemetaan kompetensi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai. Sebagai catatan, pembuatan

dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja. Hampir 50% atau 14.073 pegawai berpendidikan dibawah D3. Dibandingkan dengan 3.000.000 WP terdaftar, luas wilayah geografi, heterogenitas masyarakat dan kompleksitas peraturan perundang-undangan perpajakan, maka beban kerja per pegawai amat berat, dan tidak semua pegawai pajak yang memahami tentang Sistem informasi dan paham bagaimana menjalankannya. (www.slidepajak.com,Maret 2010)

Hal ini juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Ditegaskan oleh Bapak Ahmad Kasubag Umum KPP karees bahwa tidak semua pegawai memahami tentang Sistem Informasi, menurutnya hanya sebagian saja yang tahu dan mengerti tentang pengoprasian Sistem Informasi Direktorat jenderal pajak tersebut. Selain itu menurutnya Pegawai pajak tidak dilibatkan dalam proses perancangan dan pengembangan Sistem Informasi. Sehingga mereka tidak tahu apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi yang ada dalam system dengan yang terjadi di dalam kenyataan di KPP (Ahmad, 18 april 2011).

Sistem informasi harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Kompleksitas sistem bukanlah merupakan jaminan perbaikan kinerja, bahkan menjadi kontraproduktif jika tidak didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dalam tahapan implementasinya. Hal ini sering terjadi terutama pada perusahaan yang pengetahuan teknologi informasinya rendah. Jika pengembangan sistem informasi diserahkan pada orang-orang yang kurang berkompeten

dibidangnya maka akan berakibat fatal bagi perusahaan ketika sistem tersebut telah diterapkan (O'Brien JA, Marakas G. 2009).

Berdasarkan masalah yang ada diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Partisipasi Pengguna terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi (Studi pada KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat)"**

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Tidak semua pegawai pajak paham tentang sistem informasi dan cara menjalankannya.
2. Pegawai Pajak tidak dilibatkan dalam proses perancangan dan pengembangan Sistem informasi Akuntansi sehingga mereka tidak tahu kalau terjadi ketidaksesusaian dengan kodisi pekerjaan mereka.
3. Sistem pencatatan data realisasi penerimaan pajak sampai saat ini belum dilakukan secara terintegrasi.
4. Penerapan SIDJP khususnya MPN dan SIKKA di kantor pelayanan pajak dirasa lambat saat ini karena *server* yang ada masih terbatas.
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menemukan 12 ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

6. Hasil pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dan kegiatan operasional tahun anggaran 2008 dan 2009, ditemukan potensi kerugian negara di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu hingga Rp 96 triliun.
7. Kantor pusat mengalami kendala yaitu apabila membutuhkan informasi data penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), informasi yang diperlukan tersebut tidak dapat diakses secara cepat.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.
3. Bagaimana Kualitas Informasi yang dihasilkan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Seberapa Besar Pengaruh Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat secara parsial dan simultan.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Partisipasi Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Kualitas Informasi yang dihasilkan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat secara parsial dan simultan.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.

2. Bagi Instansi

   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.

3. Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat.

## 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung. Yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami Bandung, KPP Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Aji Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Punawarman, KPP Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl.Soekarno Hata, KPP Pratama Bandung Tegalega yang berlokasi di Jl.Soekarno Hata.

### 1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada April 2011 sampai dengan Juli 2011.

**Tabel 1.1**
**Waktu Penelitian**

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maret 2011 | April 2011 | Mei 2011 | Juni 2011 | Juli 2011 | Agustus 2011 |
| **I** | **Tahap Persiapan:** | | | | | | |
| | 1. Bimbingan dengan dosen pembimbing | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | 2. Membuat outline dan proposal UP | ■ | | | | | |
| | 3. Mengambil formulir penyusunan UP | | ■ | | | | |
| | 4. Menentukan tempat penelitian | | ■ | | | | |
| **II** | **Tahap Pelaksanaan :** | | | | | | |
| | 1. Mengajukan outline dan proposal UP | | ■ | | | | |
| | 2. Meminta surat pengantar ke KPP | | ■ | ■ | | | |
| | 3. Penelitian di perusahaan | | | ■ | | | |
| | 4. Penyusunan skripsi | | | ■ | ■ | | |
| **III** | **Tahap Pelaporan :** | | | | | | |
| | 1. Menyiapkan draft skripsi | | | | ■ | ■ | |
| | 2. Sidang akhir skripsi | | | | | ■ | |
| | 3. Penyempurnaan laporan skripsi | | | | | | ■ |
| | 4. Penggandaan skripsi | | | | | | ■ |